

Ristyn Karisma Ayu Sy
P2B122005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Pengenaan Denda Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, serta Akibat Ketidaksesuaian Denda dalam Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Yuridis Normatif yang dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pengenaan Denda Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia oleh Majelis KPPU didasarkan pada PERKPPU 4 Tahun 2009 yang dibuat untuk mengakomodir Pasal 47 UU 5 Tahun 1999, sehingga kedudukannya merupakan di atas dari PP 57 Tahun 2010. Serta Akibat Ketidaksesuaian Denda dalam Putusan Majelis KPPU pada Pelanggaran Ketentuan Pengambilalihan Saham Perusahaan yakni menimbulkan ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam menentukan besaran denda, sebagaimana keringanan sanksi yang diberikan oleh Majelis KPPU seolah tidak membuat Terlapor merasa jera, namun sebaliknya Terlapor akan mencari celah dalam keringanan tersebut untuk terhindar dari hukuman yang semestinya. Sebagaimana pada Putusan Majelis KPPU terlihat adanya disparitas karena dalam menentukan nilai denda, Majelis KPPU tidak melihat kerugian pelaku usaha lain yang terdampak selama kurun waktu terjadinya pelanggaran dengan hanya mengenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 pada Terlapor, yakni KPPU tidak memberikan denda maksimal pada pelanggar sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada instansi tersebut atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan KPPU menentukan besaran denda sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Komisi yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak patuh, terutama dengan mempertimbangkan keuntungan yang telah diperoleh oleh perusahaan pelanggar selama kurun waktu terjadinya pelanggaran dan seharusnya Majelis KPPU juga melihat dampak negatif yang dilakukan pelaku usaha dalam kurun waktu terjadinya pelanggaran guna menghindari ketidakadilan pada masyarakat dan memberikan ketakutan tersendiri bagi pelaku usaha untuk tidak melanggar UU 5 Tahun 1999.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Perusahaan, Sanksi, Pertimbangan, Akibat.

COMPANY RESTRUCTURING FROM THE PERSPECTIVE OF BUSINESS COMPETITION LAW IN INDONESIA

Ristyn Karisma Ayu Sy
P2B122005

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the Regulations on the Imposition of Fines for Violations of the Provisions for Takeovers of Company Shares in Business Competition Law in Indonesia, as well as the Consequences of Inappropriate Fines in the Decisions of the Business Competition Supervisory Commission Council on Violations of Provisions for Takeovers of Company Shares. The research method used is Normative Juridical Research which is explained qualitatively. The results of the research show that the imposition of fines for violations of the provisions for takeover of company shares in the Business Competition Law in Indonesia by the KPPU Council is based on PERKPPU 4 of 2009 which was made to accommodate Article 47 of Law 5 of 1999, so that its position is above that of PP 57 of 2010. As well as the consequences of non-compliance with fines in the KPPU Council's Decision on Violations of Company Share Takeover Provisions, namely causing injustice and inconsistency in determining the amount of the fine, as the relief of sanctions given by the KPPU Assembly does not seem to deter the Reported Party, but on the contrary the Reported Party will look for loopholes in the relief to avoid the punishment that should be . Similarly, the KPPU Council's decision saw disparity because in determining the value of the fine, the KPPU Council did not look at the losses of other business actors affected during the period when the violation occurred by only imposing a fine of Rp. 1,000,000,000.00 to the Reported Party, namely that the KPPU does not impose maximum fines on violators, thereby potentially causing harm to the community and loss of public trust in agencies above the applicable laws and regulations. From the results of this research, it is hoped that the KPPU will determine the amount of fines in accordance with applicable Government Regulations and Commission Regulations, so that it can have a deterrent effect on business actors who do not comply, especially by considering the profits that have been obtained by the violating company during the period when the violation occurred and the Council should KPPU also looks at the negative impacts carried out by business actors during the period when violations occur in order to avoid injustice to society and to create fear for business actors not to violate Law 5 of 1999.

Keywords: Restructuring, Company, Sanctions, Considerations, Consequences.